

Depolitisasi Birokrasi dan Kebijakan Pengembangan Pertanian Agropolitan Jagung dalam Meningkatkan Ekonomi Petani di Provinsi Gorontalo

Politicization Bureaucracy and Agricultural Policy in Improving Economy Agropolitan Corn Farmers in Gorontalo

Moonti Usman*¹⁾ dan Wantu Sastro²⁾

¹⁾ Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.

²⁾ Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Gorontalo.

*e-mail : usmanmoonti@ung.ac.id ; sastrowantu@ung.ac.id

ABSTRACT

This research aims at discovering the policy of corn-based Agropolitan in agricultural development for economic growth sustainability of the region. It is important to understand the role of the government in forming and implementing the agricultural development policy for the corn agropolitan, that has been experiencing production decline, to effectively function in the market and profitable for the farmers. This is a qualitative research using instruments that are based on relevant facts and concepts to investigate the ability of both the human resource and the technology and science to develop an economic program, especially in the corn agricultural sector. It is expected that this research leads to an improvement toward the development acceleration in corn agricultural sector.

Keywords: Depoliticization, bureaucracy, agricultural, corn.

Diterima : 11 Agustus 2016, disetujui : 25 Agustus 2016

PENDAHULUAN

Pemerintah provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pembangunan di bidang pertanian berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dengan cara mengembangkan sumberdaya petani demi mengurangi masalah kemiskinan. Meskipun pemerintah daerahnya saat ini memprioritas kebijakan pembangunan dalam tiga bidang yaitu sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Namun sektor pembangunan pertanian masih tetap dilaksanakan, karena sektor ini paling banyak menampung tenaga kerja yang pada umumnya di daerah pedesaan.

Kebijakan pada sektor ini sesungguhnya sangat baik, namun demikian masih banyak permasalahan terutama kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya angka kemiskinan tahun 2016 masih berkisar 18,1%. Persoalan lainnya adalah kebijakan agropolitan meskipun pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani untuk meraih kesejahteraan, namun tidak bisa dihindari kebijakannya masih bersifat politis. Dengan alasan kebijakan tersebut lebih berorientasi pada nuansa politik anggaran yang begitu besar yaitu dengan mendatangkan modal pembiayaan dari pemerintah pusat yang kurang lebih ratusan milyar. Namun demikian kebijakan politik anggaran yang ditempuh oleh pemerintah provinsi itu tidak disertai dengan manajemen pengelolaannya yang dinilai kurang tepat, sehingga

ketidakseriusan dalam memanfaatkan potensi ekonomi pertanian pada program agropolitan jagung tersebut belum maksimal. Demikian pula kegagalan memanfaatkan potensi ini disebabkan pengabaian variabel-variabel *human resources*, mekanisme pasar, perilaku petani.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menginterpretasikan penguatan dan pembangunan pertanian yang berbanding lurus dengan produktivitas hasil pertanian jagung yang menghindari kecenderungan politik pembangunan pertanian yang sangat ditentukan oleh politisasi, sehingga tidak terjadi menguatnya politik pembangunan pertanian yang menyimpang dari misi dasar kebijakan pembangunan agropolitan jagung. Selain itu tujuan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pengembangan khususnya terhadap percepatan pembangunan disektor pertanian jagung.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan dan menemukan suatu fenomena yang memiliki karakter unik dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan depolitisasi birokrasi dan kebijakan pengembangan pertanian agropolitan jagung sebagai potensi ekonomi wilayah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini lebih peka dalam menangkap berbagai fenomena informasi, khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian, disamping itu penelitian ini dapat menyajikan bentuk yang holistik dan menyeluruh dengan menganalisis suatu fenomena sosial.

Data dikumpulkan secara *integrative* dengan melihat data-data yang relevan dan sempurna dari berbagai sumber yaitu: Pertama, sumber data utama dari di wilayah provinsi Gorontalo dengan melakukan pengamatan maupun observasi dan menanyakan sebanyak mungkin sumber-sumber yang dianggap berkompeten dengan permasalahan penelitian. Setelah itu wawancara mendalam (*In Depth-Interview*), dilakukan untuk mendapatkan informasi (data empiris); Kedua, Sumber data juga diperoleh melalui data dokumen yang tersedia baik dari pemerintah daerah, masyarakat, media, kepustakaan, workshop dan sebagainya yang dianggap sebagai sumber data pelengkap. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan analisa data dengan menggunakan analisis model interaktif (Miles dan Huberman, 1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kebijakan Pertanian Agropolitan Jagung dalam Mempercepat Pembangunan Daerah

Perubahan kebijakan pembangunan yang dulunya tersentralistis menjadi desentralistis yang memegang peran penting adalah masyarakat daerah maka arah pembangunan pertanian pada masyarakat di provinsi Gorontalo yang memekarkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000 bersamaan dengan perubahan politik di tanah air yang mengalami reformasi politik membuat terobosan baru dari yang berhubungan dengan pembangunan pertanian yang berorientasi pada agropolitan jagung. Agropolitan jagung dianggap sebagai modal dasar dari bagian pembangunan pertanian yang sangat mendukung pembangunan nasional bagi pembentukan struktur ekonomi yang kuat bagi sebagai modal pembangunan daerah yang antara lain pemberdayaan struktur ekonomi kerakyatan melalui agropolitan jagung.

Refleksi kebijakan agropolitan jagung yang didukung oleh dukungan sistem politik yang demokratis pemberian otonomi daerah yang lebih luas, memberi ruang bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dengan berusaha melibatkan seluruh *stakeholder* yakni mulai dari dukungan politik dari pejabat pemerintah daerah kabupaten maupun kota, juga seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat petani yang ada dipedesaan, sehingga pemerintah Fadel berusaha memuluskan kebijakannya yang sudah dibiayai ratusan milyaran rupiah melalui dana pemerintah pusat sebagai anggaran yang dikucurkan untuk menangani masalah

pertanian jagung di Gorontalo. Energi dan gaya kepemimpinan yang mengandalkan simpati masyarakat terutama di pedesaan sangat dibutuhkan dalam memuluskan dan mensukseskan program kebijakan tersebut, sehingga dengan kesungguhan dalam menangani dan mengamankan kebijakan program jagung memunculkan gaya kepemimpinan yang kelihatannya cenderung bertindak fasilitator, stimulator dan promotor dan sering pula eksekutor lewat satuan kerja birokrasi daerah yang dimotori langsung oleh Dinas Pertanian dan Pangan provinsi Gorontalo.

Orientasi kebijakan tersebut lebih bernuansa pada dominasi aktor-aktor birokrasi yang menjadi bawahannya untuk mengembangkan kreativitas masyarakat petani yang masih sebagian besar cenderung lamban untuk menyambut kebijakannya, karenanya kebijakan seringkali kelihatan lebih diwarnai oleh mobilisasi besar-besaran dimana pemerintah daerahnya kelihatan sebagai *local government driven* yang seharusnya bertindak untuk merangsang *people driven*. Kondisi yang demikian masih dimaklumi mengingat kebijakan yang dibangun melalui program agropolitan jagung tidak diiringi oleh kesadaran petani bahwa kebijakannya bertujuan untuk membebaskan kondisi masyarakat pedesaan yang sebagian besar berlatarbelakang petani dari rantai kemiskinan.

Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian pada sektor agropolitan jagung berguna untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang sudah lama menjadi bagian dari kondisi masyarakat yang sejak tahun 2000 menjadi provinsi baru. Kurang lebih enam belas tahun berdiri proporsi jumlah penduduk miskin berdasarkan data tahun 2003 masih 18,01 persen dari penduduk yang kurang lebih 1.097.990 jiwa. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Gorontalo sangat bertanggungjawab terhadap kebijakan untuk penurunan proporsi angka penduduk miskin yang sebagian besar para petani dan nelayan berdomisili pada wilayah pedesaan. Usaha untuk mengurangi populasi penduduk miskin, maka tentu perlu adanya upaya kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong kembali sebuah program untuk memberdayakan pembangunan pertanian dalam rangka tidak hanya mengurangi kemiskinan namun pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengurangan angka kemiskinan di daerah Gorontalo yang sudah sempat menembus ranking empat nasional sebagai daerah termiskin di Indonesia (data Metro TV tahun 2010) tersebut, maka salah satu solusi kebijakan program agropolitan jagung sangat penting untuk dilanjutkan atau diberdayakan kembali oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hal ini cukup beralasan dengan pertimbangan bahwa mempercepat pembangunan pertanian pada sektor agropolitan jagung sebagai salah satu program yang sangat didukung dan dikawal oleh pemerintah pusat dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Gorontalo yang sedang melepaskan dirinya dari kemiskinan dan selanjutnya mengimpikan kesejahteraan hidupnya lebih baik sebagai berikut:

- (1). Program agropolitan jagung masih tergolong sebagai penyedia lapangan pekerjaan di daerah pedesaan yang dapat mengatasi masalah pengangguran dan migrasi penduduk dari desa ke kota;
- (2). Program agropolitan jagung untuk masyarakat Gorontalo sangat cocok untuk menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa, sehingga dengan program ini pembangunan desa dapat berjalan dengan baik seiring dengan perbaikan perekonomian desa yang secara langsung dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk menambah pendapatan dan mengurangi kemiskinan di desa;
- (3). Program agropolitan jagung sebagai tanaman untuk kebutuhan pokok yang sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan sebagai pilar yang mampu menyediakan swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional maupun daerah;
- (4). Program agropolitan jagung sebagai bagian yang penting dalam pembangunan pertanian di daerah sebagai bahan pokok yang memiliki harga yang tidak terlalu jauh dengan bahan pokok beras, yang tentunya dapat berpengaruh terhadap laju inflasi dan perdagangan yang sesungguhnya sebagai pejangga terhadap stabilitas perekonomian nasional maupun daerah;

- (5). Program agropolitan jagung sebagai bahan pokok yang dapat mensuplai kebutuhan industri baik dalam negeri dan luar negeri;
- (6). Program agropolitan jagung sebagai salah satu produk ekspor yang dapat diandalkan bagi perekonomian daerah;
- (7). Program agropolitan jagung sebagai produk perdagangan yang memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Arena Politisasi Lokal

Pembangunan kebijakan pertanian agropolitan jagung Gorontalo membutuhkan sebuah kebijakan yang memiliki orientasi pembangunan daerah yang berkelanjutan yang tidak hanya ditujukan kebijakan yang mengarah pada konsumsi politik yang semata-mata mengutamakan kepentingan para aktor pejabat elit/politik. Pembangunan pertanian yang berbasis pada kemampuan kondisi geografis di tingkat lokal seperti pengembangan agropolitan jagung sesungguhnya bagi masyarakat Gorontalo yang sebagian besar sumber ekonomi berada pada sektor pertanian antara lain tanaman jagung mempunyai nilai strategis sebagai modal yang tidak hanya bernuansa pada sektor ekonomi, namun pula bisa membangkitkan modal sosial untuk bersama-sama membangun daerah. Kebijakan agropolitan jagung kalau dikelola secara berkelanjutan sebagai kebijakan pemerintah daerah, maka dapat menggerakkan aktivitas pembangunan.

Secara ekonomis program agropolitan jagung dengan nuansa yang berorientasi pada industrialisasi modern dan berprinsip pada nilai *entrepreneurship* pada lokus lokal. Langkah kebijakan yang dinilai sangat spektakuler ini dapat dilihat dari hasil studi Wantu (2011) bahwa nilai kewirausahaan sangat mengilhami pemerintah daerah provinsi Gorontalo sebagai daerah yang dianggap sukses oleh banyak kalangan karena selalu menggaungkan dirinya sebagai daerah yang mempraktekkan lingkungan birokrasi pemerintahannya dengan gerakan *reinventing Government* atau dengan istilah lain *new public manajement* yang arsiteknya adalah gubernur pertama Gorontalo Fadel Muhammad.

Kebijakan yang dibuat oleh gubernur Fadel Muhammad banyak melakukan langkah-langkah penataan birokrasi yang dituangkan dalam visi pembangunan Gorontalo 2007-2012 adalah Gorontalo Provinsi Inovatif yang diwujudkan melalui misi yaitu Membangun Gorontalo Yang Mandiri, Produktif dan Religius, yang tujuan strategisnya adalah pembangunan Gorontalo 2007-2012 sebagai berikut: (1). Mewujudkan Gorontalo yang mandiri; (2). Membangun ekonomi rakyat yang produktif; (3). Mewujudkan Gorontalo yang religious (Renstrada, 2005-2012). Kebijakan Fadel dalam mempraktekkan *reinventing government* dan kemudian berkembang menjadi *new public manajement* dalam pemerintah daerah di provinsi Gorontalo, sangat diilhami oleh praktek di beberapa negara sebagaimana dikemukakan oleh Rosenbloom dan Kravchuk (2005:4) bahwa NPM dalam implementasinya banyak digunakan di negara seperti Inggris, Australia, New Zealand dan negara-negara di Skandinavia yang memelihara logika pendekatan kaum reformis dari pendekatan manajemen yang secara tegas menyatakan sebagian besar pejabat publik tidak memiliki legitimasi politik dan fungsi kebijakan publik yang sangat berlawanan dengan logika pemikiran dari pendekatan manajemen tradisional yang mempertahankan dikotomi antara politik dan administrasi. Logika pemikiran dari kelompok pendekatan manajemen tradisional mempertahankan dikotomi antara politik dan administrasi.

Oleh karena itu berkaitan dengan kebijakannya tentang *reinventing Government* atau *NPM*, maka Fadel dalam mencapai visi, misi dan tujuan strategis yang dikembangkannya tersebut, maka ada 2 (dua) dari 4 (empat) agenda pokok pembangunan yang akan dijalankan dan hal ini sangat berkaitan dengan tulisan ini yaitu: dua agenda berhubungan langsung kinerja pemerintahan sebagai berikut: (1). Inovasi kepemimpinan wirausaha yang dititikberatkan pada pencapaian prestasi aksi dan prestasi hasil yang mampu menumbuhkan kepercayaan rakyat, yang diwujudkan ke dalam kemampuan penyediaan *public goods* dan *public services* yang mencukupi, berkualitas, ekonomi dan efektif/relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan masalah yang

dihadapi rakyat. (2). Inovasi pengembangan sumberdaya manusia yang berorientasi wirausaha, mandiri dan religius melalui pembangunan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemandirian individu dan penanaman semangat kerjasama kelompok, pencerahan keagamaan dan budaya yang membangkitkan etos kerja wirausaha semangat kerjasama dan toleransi, pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (Wantu, 2011).

Implementasi kebijakannya dibangun melalui program agropolitan jagung, dapat dipastikan sangat terkait dengan mimpi sebuah daerah yang mempraktekkan pemerintah daerah yang berorientasi pada nilai-nilai administrasi publik yang mengarah pada nilai-nilai *reinventing government* dan kemudian berkembang menjadi *new public management*. Proses asimilasi kebijakan yang bernuansa pembangunan hamparan pertanian disektor jagung dengan mempraktekkan nilai-nilai birokrasi modern yang sudah lama diadopsi oleh negara *anglo saxon* seperti dikatakan di atas, menjadikan agropolitan sebagai program besar yang yang sesungguhnya sebagai tanaman yang sudah lama digeluti oleh masyarakat tani di Gorontalo secara turun temurun namun dikelola secara modern. Meskipun nilai pembangunan pertanian ini dipandang sebelah mata oleh segelintir orang terutama dari para elit, namun resonansi di tingkat pusat sangat menggema luar biasa baik secara nasional bahkan di benua Afrika seperti di negara Zambia, sehingga gubernur Fadel dianggap sebagai pemimpin daerah yang pertama kali mencetuskan agropolitan jagung. Namun, nuansa politik sangat kental dan menjadikan program komoditi ini memiliki nilai politik yang sangat tinggi. Ekskalasi pertarungan politik yang memainkan kebijakan agropolitan jagung itu sendiri sebenarnya pada satu sisi dimainkan oleh aktor utama Fadel dengan kekuatan birokrasi yang dipimpinya yang membangun pencitraan politik dan mendatangkan politik anggaran di tingkat pusat dan pula membangun kekuatan politik di daerah yang sempat menolak kepemimpinannya pada pemilihan dirinya sebagai gubernur pertama. Sementara pada sisi lain permainan politik jagung diperan pula oleh aktor-aktor politik yang sebagian besar sangat kontradiktif dan kritis terhadap kebijakan gubernur Fadel yang secara langsung dimainkan oleh para bupati dan walikota dimasa kepemimpinannya sejak tahun 2001 hingga 2009.

Perlawanan terhadap kebijakannya sangat terasa dimainkan oleh pejabat politik dan mereka berusaha meminggirkan dan secara terang-terangan dengan menolak kebijakannya antara lain yang berhubungan dengan agropolitan jagung. Pasca kepemimpinan gubernur Fadel yang sesungguhnya berakhir sampai tahun 2011, namun tidak sampai menyelesaikan masa tugasnya sebagai gubernur, karena lantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada kabinet presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua tahun 2009-2014, walaupun Fadel sendiri terkena *reshuffle* kabinet sebelum masa tugasnya pada kabinet tersebut. Sejak berakhirnya kepemimpinan gubernur Fadel tahun 2009, dapat terlihat kebijakannya mengalami masa *decline* (kemunduran) dalam arti *design* program agropolitan jagung yang menjadi andalan pemerintah dan masyarakat di propinsi Gorontalo dapat dikatakan terpinggirkan sebagai sebuah kebijakan utama, walaupun ada hanya terbatas sebagai program yang ada di setiap Dinas Pertanian dan pangan provinsi maupun kabupaten/kota dengan kehilangan resonansi di tingkat nasional.

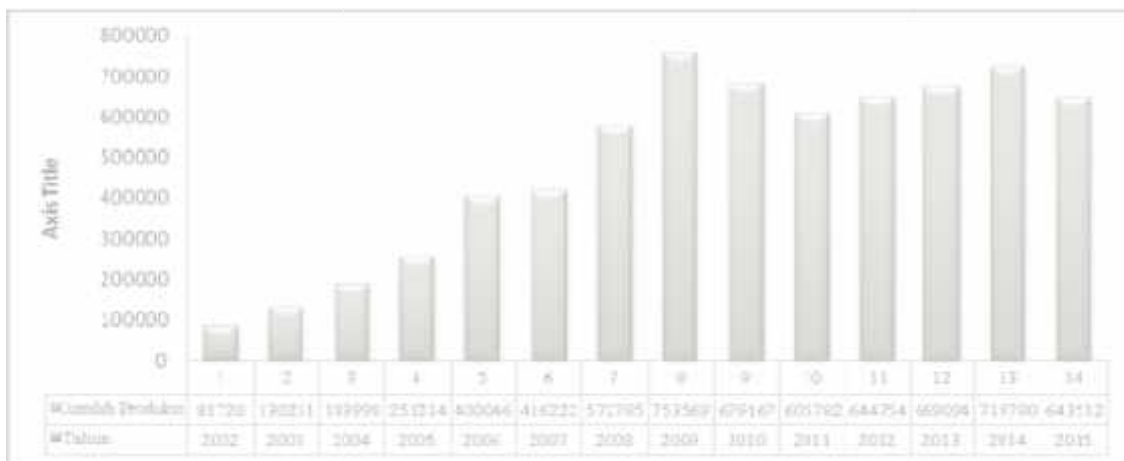
Namun demikian ketika peralihan kepemimpinan nasional berganti dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono kepada presiden Jokowi-Yusuf Kalla kebijakan politik pertanian mulai digalakkan kembali dengan mempercepat akselerasi pembangunan pertanian yang mampu dianggap sebagai pilar maupun fondasi kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan kebijakan yang kembali menempatkan primadona pertanian dinilai di tingkat lokal sebagai sebuah kebijakan yang tepat, mengingat sektor pertanian jagung di Gorontalo memiliki prospek yang baik, karena tidak hanya mampu menyediakan lumbung ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan alternatif terhadap kebutuhan pokok selain beras di tingkat masyarakat pedesaan yang saat ini mengalami ketiadakpastian terhadap ketersediaan maupun harga yang fluktuatif dan berdampak pada ekonomi masyarakat yang masih banyak hidup pada garis kemiskinan.

Oleh karena itu tanaman jagung yang sudah lama menjadi bagian dari sumber kehidupan para petani

Gorontalo pada sektor pertanian sudah menjadi sumber pangan alternatif di daerah selain tanaman padi. Sehingga jagung memiliki nilai yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber utama pangan bagi penduduk juga tidak lain sebagai bahan bagi pakan ternak. Daerah Gorontalo termasuk dalam 12 (dua belas) provinsi dan 45 (empat puluh lima) kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan bagi suplai jagung nasional antara lain Gorontalo, Sumbawa, Bima, Kediri, Blitar, Garut Grobogan, Kendal , Tuban, Malang, Kendal, Lampung Tengah, Lampung Timur dan lainnya. Dari hamparan wilayah kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia telah menenpatkan Indonesia sebagai lumbung jagung dunia yang memiliki ranking 8 dengan kontribusi 2,06 terhadap produksi jagung dunia (Tribunnews, 2016).

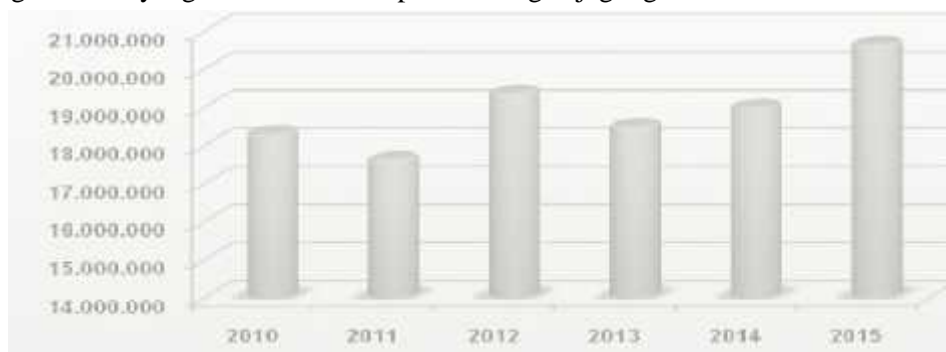
Dengan melihat posisi provinsi Gorontalo sebagai lumbung jagung di Indonesia, maka dapat dikatakan agropolitan jagung Gorontalo termasuk sebagai produk pangan nasional yang sangat perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional. Program jagung yang pada awalnya dicanangkan oleh gubernur Fadel Muhammad dan dianggap sebagai guyanan politik para elit Gorontalo terutama para elit yang menolak kepemimpinan Fadel sesungguhnya sudah sebagai aset program yang tidak bisa dipandang yang mempunyai nilai rendah. Namun ternyata sebagai tanaman alternatif dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan nasional maupun di tingkat lokal.

Betapa pentingnya agropolitan jagung Gorontalo dimana daerah ini dianggap sebagai sentra produksi nasional sebagaimana dapat dilihat dari data sebelumnya yang kemudian dirangkum dalam gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Data Diakronis jagung Gorontalo (Ton)

Berdasarkan data ini sangat terlihat provinsi Gorontalo sebagai lumbung jagung nasional sehingga termasuk sebagai daerah yang termasuk dalam perkembangan jagung nasional



Gambar 2. Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2010-2015 (Data ARAM-I BPS tahun 2015)

Melihat eskalasi data secara nasional berdasarkan data ARAM-I BPS tersebut menunjukkan bahwa produksi jagung 20,67 juta ton atau naik 1,66 juta ton (8,72%) dibandingkan tahun 2014 dan merupakan

produksi tertinggi selama lima tahun terakhir. Peningkatan produksi ini memberi nilai tambah ekonomi Rp. 5,3 triliun. Data di lapangan pada bulan Agustus 2015 menunjukkan luas panen 3,04,5 ribu ha dan produksi 1,5 juta ton. Sementara bulan September luas panen 233,5 ribu ha dan produksi 1,59 juta ton. Dengan data ini dapat dikatakan bahwa setiap bulan terdapat panen dan produksi jagung bulanan di atas 1,0 juta ton. Kecenderungan seperti ini menunjukkan kebutuhan akan adanya produksi dan stok jagung lokal cukup.

Mengamankan kenaikan produksi jagung yang sangat menjanjikan sebagai salah satu alternatif pangan non beras, yang tentu dapat mengamankan ekonomi nasional dimana sejak tahun 2015 telah mampu menghemat devisa dari jagung sebesar US\$ 585 juta atau setara Rp. 7,6 triliun (ARAM-I BPS, 2015). Untuk lebih mersangsang kebijakan ini, maka pemerintah pusat sangat berkepentingan mengamankan pangan nasional yang sudah mulai memperlihatkan kecenderungan mulai membaik, maka salah satunya adalah upaya mengantisipasi kondisi ekonomi nasional yang berdampak pada masyarakat, maka pertimbangan utama pemerintah pusat mengintrusikan kebijakan tentang perlunya membangun sektor pertanian melalui kebijakan PAJALE (padi, jagung dan kedelai) yang dikawal langsung aparat negara baik kepolisian, TNI, Kejaksaan, Camat, Kepala Desa dan instansi terkait lainnya di pemerintahan daerah). Sehingga pengawalan ini diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang memerlukan kebijakan untuk mengawal ketahanan pangan dalam mencapai kedaulatan pangan nasional maupun daerah.

Kedaulatan pangan itu sendiri bagi kepentingan masyarakat Gorontalo memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam rangka untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.18 tahun 2012 yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Akses ke pangan adalah hak asasi manusia, sehingga negara wajib menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman bermutu, bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara merata diseluruh wilayah negara sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal (LPIKP, 2014).

Kebijakan untuk membangun ketahanan pangan di provinsi Gorontalo tentu sangat tergantung pada sejauhmana kebijakan pemerintah daerah memperbanyak terhadap eksploitasi terhadap lahan pertanian yang masih belum digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pengembangan agropolitan jagung. Langkah ini dapat ditempuh melalui sebuah kebijakan bersama antara pemerintah provinsi dengan semua kabupaten yang ada dilingkungan pemerintahan provinsi Gorontalo dengan usaha melakukan pembukaan dan pengembangan sentra atau kawasan tanaman jagung secara bersama-sama dengan memotivasi kinerja masyarakat tani untuk giat membuka lahan dan menanam jagung. Dengan demikian agropolitan jagung sebagai program agrobisnis yang mampu yang mampu menjadi sebuah program ketahanan pangan juga sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

KESIMPULAN

Kegiatan program agropolitan sebagai *buffer area* (kawasan penyangga) suatu ketahanan pangan di tingkat lokal sepatutnya ada keharmonisan terhadap pelaksanaan program ini antara lain : Membangun pemerintahan daerah yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pertanian antara lain pada sektor agropolitan jagung ; Keharmonisan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah dibentuk di daerah seharusnya dipatuhi dan dijalankan oleh semua pihak terutama koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan semua *stakeholder* ; Keharmonisan bersama pejabat politik untuk mengimplementasi kebijakan berdasarkan aturan main yang dituangkan dalam peraturan daerah dan

Usman, M dan Sastro, W : Depolitisasi Birokrasi dan Kebijakan Pengembangan Pertanian Agropolitan Jagung...

sekaligus menjadikan agropolitan jagung harus didukung sebagai kebijakan yang didukung oleh sistem politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Pusat, 2015, *ARAM I Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2010-2015*
- Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP), 2014, *Kedaulatan Pangan Indonesia: Meningkatkan Daya saing Petani Indonesia Di Tengah-Tengah Pengaruh Globalisasi Abad 21*, Jakarta, Berita Nusantara
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press
- Rosenbloom, David and Robert Kravchuk, 2005, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector*, McGraw-Hill Companies
- Tribunnes.Com, Kementan, 2015, *Indonesia Lumbung Jagung, Harga Tinggi Tidak Perlu Import*
- Wantu, Sastro, 2011, *Rekrutmen Pejabat Di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Bureaucratic Politic*, Dalam Disertasi Program Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang